



News Title : Langkah Maju Bursa CPO

Media Name : Bisnis Indonesia

Journalist : Hendra Wibawa, Indra Gunawan

Publish Date : 03 March 2023

Tonality : Positive

News Page : 3

News Value : 534,375,000

Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan), Eddy Martono (Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)), Musdhalifah Machmud (Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian)

Ads Value : 178,125,000

Section/Rubrication : Editors Choices

Topic : Aturan Izin Ekspor CPO

| MINYAK SAWIT |

LANGKAH MAJU BURSA CPO

Bisnis, JAKARTA — Keinginan pemerintah membuat harga acuan minyak sawit mentah pada tahun ini mulai mengerucut setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menggodok aturan baru ekspor komoditas itu.

Indra Gunawan & Hendra Wibawa
redaksi@bisnis.com

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan bahwa beleid baru itu akan mengatur proses ekspor minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) melalui bursa berjangka komoditas.

Menurutnya, aturan itu akan mempunyai beberapa dasar jika direalisasikan di antaranya pemerintah bisa melihat secara transparan terkait dengan tata kelola CPO karena semua transaksi akan wajib dicatat di bursa berjangka.

"Strategi besar kami adalah bagaimana menciptakan ekspor CPO melalui bursa berjangka. Kira-kira nanti kebijakannya adalah setiap penerbitan izin ekspor CPO dan turunannya harus dipastikan bahwa CPO itu diperoleh dari bursa berjangka," katanya dalam diskusi bertema *Strategi Indonesia Menjadi Barometer Harga Sawit Dunia*, Kamis (2/3).

Selain itu, dia menambahkan manfaat lainnya kebijakan itu adalah memudahkan proses ekspor CPO dan lebih jelas karena informasinya detail.

Dia menegaskan penerimaan negara juga akan lebih jelas dan transparan termasuk kemudahan penelusuran harga CPO sampai dengan tandan buah segar (TBS). Namun, Didid berharap pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang di antaranya melihat bagaimana dampaknya terhadap kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan ekspor.

Selain itu, tegasnya, jenis CPO apa saja yang wajib diekspor me-

lalui bursa berjangka dan selanjutnya mekanisme bursa untuk memfasilitasi perdagangan.

"Tidak kalah penting untuk menentukan berapa yang boleh di ekspor. Kita juga membutuhkan neraca komoditas CPO," kata Didid.

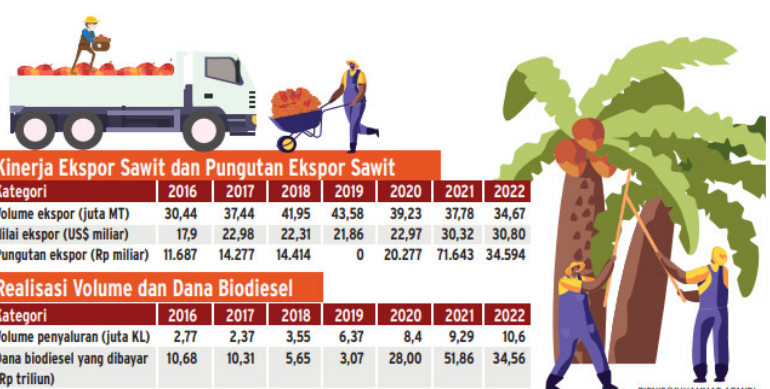
Menurutnya, pertimbangan krusial itu diperlukan agar kejadian tahun lalu tidak terulang, yaitu saat pengusaha melakukan ekspor tetapi melewatkan kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik.

"Kita sudah ada kebijakan DMO. Lantas apakah DMO ini akan diteruskan atau kebijakan yang sekarang ini sudah bisa meminimalisir kebutuhan kebijakan atau seperti apa ini masih terus kami kaji," katanya.

Sejauh ini, dia belum bisa memastikan kapan kebijakan baru itu akan diberlakukan. Alasannya, sampai kini Bappebti masih terus berdiskusi dengan berbagai pihak untuk membuat kebijakan yang paling tepat.

"Mungkin belum ideal tetapi kira-kira yang paling tepat saat ini. Ke depan akan kita perbaiki. Karena kita juga perlu melihat dari sisi insentif pelaku usahanya, baik dari pajaknya, biayanya, transaksinya," katanya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah mendorong Bappebti untuk membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia salah satunya komoditas CPO.



Sumber: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, diolah

Mendag menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun, bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.

DAYA SAING

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyatakan menunggu rencana Bappebti merancang kebijakan baru terkait aturan ekspor CPO.

Menurutnya, pengusaha pada prinsipnya akan mengikuti, selama tidak mengganggu daya saing produk sawit Indonesia.

"Nanti kita lihat aturannya seperti apa yang penting jangan sampai ada beban biaya baru yang menyebabkan harga kita kurang kompetitif," ujar Eddy kepada *Bisnis*.

Dia menyambut positif rencana

pemerintah yang akan membuat harga acuan atau bursa berjangka komoditas termasuk sawit yang ditargetkan selesai akhir tahun ini.

Saat ini, Eddy mengungkapkan Indonesia memiliki ICDX dan KPBN Dumai sebagai bursa berjangka untuk komoditas sawit.

"Sekarang sebenarnya harga acuan KPBN juga sudah digunakan. Artinya, kalau nanti pemerintah mau membuat harga acuan melalui bursa komoditas tidak ada masalah," kata Eddy.

Dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud berharap Indonesia segera menjadi barometer harga sawit dunia.

Harapan itu dapat diwujudkan dengan pemberlakuan program

mandatori pemakaian bahan bakar minyak biodiesel 35% (B35) yang dimulai sejak awal Februari 2023.

Dengan konsistensi penerapan B35, katanya, stabilitas harga sawit makin terjaga. Setidaknya 13,15 juta kiloliter CPO bakal terserap program B35 per tahun.

"Strategi Indonesia menjadi barometer sawit dunia, ini bukan cita-cita, tapi insyaallah akan segera tercapai," ujar Musdhalifah.

Dia mengungkapkan perjuangan dalam membangun industri dan perdagangan sawit Indonesia kerap mendapat tantangan luar biasa, terutama terkait kampanye negatif sawit di dalam negeri.

Hal tersebut, marak terjadi beberapa tahun lalu. Padahal, menurut Musdhalifah, industri sawit justru membuat masyarakat Indonesia makin sejahtera. □